



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 188.42 / 38 / 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

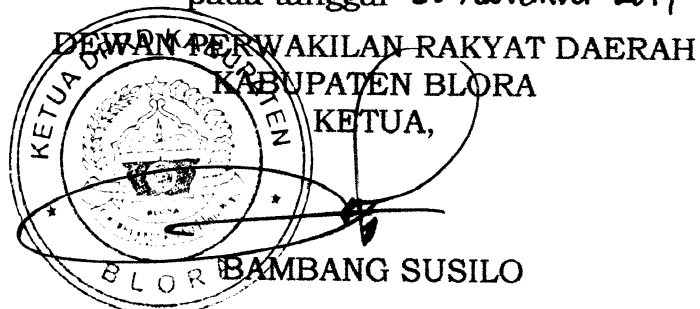
Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor : 180/2586 tanggal 9 November 2017 perihal Penyampaian Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Kab. Blora Tahun 2018;

2. Hasil Musyawarah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 30 November 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 November 2017



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Blora.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA
 NOMOR : 188.42 / 38 / 2017
 TANGGAL : 30 November 2017

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 TAHUN 2018**

A. Ranperda Umum

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
1.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Regulasi tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	V		DPRD	
2.	Penataan Pedagang Kaki Lima	Regulasi tentang penataan pedagang kaki lima	V		DPRD	
3.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Regulasi tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern		V	DPRD	
4.	Kabupaten Layak Difabel	Regulasi tentang Kabupaten layak difabel	V		DPRD	
5.	Pendidikan Keagamaan	Regulasi tentang pendidikan keagamaan	V		DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
6.	Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah	Regulasi tentang pedoman pembentukan peraturan daerah	V		DPRD	
7.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan petani	V		DPRD	
8.	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Regulasi tentang penataan perumahan dan kawasan permukiman	V		DPRD	
9.	Penyelenggaraan Pendidikan	Regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan	V		DPRD	
10.	Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji	Regulasi mengenai Biaya Transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	V		DPRD	
11.	Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial meliputi PMKS dan PSKS	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
12.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BLORA	Penghapusan beberapa pasal yang kurang relevan dengan perkembangan keadaan.		V	PEMKAB	
13.	Tanda Daftar Perusahaan	Penyelenggaraan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan	V		PEMKAB	
14.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora	Pemisahan dan pemecahan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perda Kab. Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora		V	PEMKAB	
15.	Kerjasama Antar Desa	Mengatur ketentuan mengenai kerjasama Desa sesuai amanat Pasal 35 Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa dan Pasal 149 PP Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	Mencabut regulasi lama yaitu Perda Kab. Blora Nomor 9 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
16.	Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan	Mengatur regulasi terkait pelaksanaan pembangunan sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
17.	Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa	Perubahan regulasi Perangkat Desa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		V	PEMKAB	
18.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora	Perubahan regulasi Perangkat Desa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permendagri 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa		V	PEMKAB	
19.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Perubahan sebagai tindak lanjut dari hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah		V	PEMKAB	
20.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Perubahan sebagai tindak lanjut dari hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah		V	PEMKAB	
21.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	Perubahan tarif dan ketentuan penambahan <i>tapping box</i> (alat untuk merekam transaksi)		V	PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
22.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perubahan ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada masing-masing wajib pajak		V	PEMKAB	
23.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang memuat tentang pungutan untuk pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan bibit yang diproduksi daerah	V		PEMKAB	
24.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Regulasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut Pasal 105 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	V		PEMKAB	
25.	Perubahan Atas Perda Kab. Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 – 2031	Perubahan regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Blora Tahun 2011 – 2031		V	PEMKAB	
26.	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Regulasi tentang tera, tera ulang, alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya	V		PEMKAB	
27.	Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	Pendaftaran, pendaftaran, pengembangan, akses pembiayaan, pembinaan dan pengawasan	V		PEMKAB	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KETERANGAN
			BARU	UBAH		
28.	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Regulasi tentang pedoman tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	V		PEMKAB	
29.	Penyelenggaraan Kearsipan	Regulasi tentang Penyelenggaraan Kearsipan	V		PEMKAB	
30.	Irigasi	Regulasi tentang Irigasi	V		PEMKAB	
31.	Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa	Regulasi tentang pedoman pembentukan peraturan di Desa	V		PEMKAB	
32.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Regulasi mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil	V		PEMKAB	

B. Ranperda Komulasi Terbuka

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Komulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2.	Penataan Kecamatan / Penataan Desa	Komulasi terbuka penataan kecamatan / desa	PEMKAB	
3.	APBD	Komulasi terbuka APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PEMKAB	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA
KETUA
BAMBANG SUSILO

